



**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh

Adinda Intan Dwitastany

130810301133

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Adinda Intan Dwitastany

130810301133

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Alm. Drs. Abdul Manan dan Ibunda Siti Sumartini tersayang, yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan merawat saya hingga saya sampai saat ini. Dan juga dengan sabar memberi dukungan, doa, saran, dan kritikan kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Papi dan Mami.
2. Kakakku tersayang Adhistia Paramita, yang selama ini selalu mendukung saya sehingga saya lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Gilang Wahyu Apriliaan sebagai sosok yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak Ipar Dwi Faridianto yang selalu memberikan semangat
5. Keluarga besarku dan semua orang yang selama ini telah membantu, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada saya.
6. Sahabat-sahabatku. Selamat berjuang.
7. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan, jaya-jayalah kamu. Terima kasihku untukmu.

MOTTO

“Berdoa dan bekerja keras”

(Alm. Drs. Abdul Manan)

“jangan lewatkan sunahmu”

(Siti Sumartini)

“Kita yang mengatur hidup kita, bukan hidup yang mengatur kita.”

(Adhastia Paramita)

“Kebahagiaan dunia tiada artinya jika dibandingkan dengan kebahagiaan akhirat”

(Adinda Intan Dwitastany)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Intan Dwitastany

NIM : 130810301133

Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Judul : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2017

Yang menyatakan,

Adinda Intan Dwitastany
NIM 130810301133

SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO**

Oleh

Adinda Intan Dwitastany

NIM 130810301133

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Djoko Supadmoko, MM, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Aisa Tri Agustini, SE, MSc

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

Nama Mahasiswa : Adinda Intan Dwitastany

N I M : 130810301133

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan: 16 Februari 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Djoko Supadmoko, MM, Ak.

NIP. 195502271984031001

Aisa Tri Agustini, SE, MSc

NIP. 198808032014042002

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.

NIP. 19640809 199003 2001

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

BONDOWOSO

Yang dipersiapkandandisusunoleh:

Nama : Adinda Intan Dwitastany

NIM : 130810301133

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

20 Maret 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE,M.Sc,Ak (.....)

NIP. 19830624 200604 2001

Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak (.....)

NIP. 19591110 198902 1001

Anggota : Novi Wulandari, SE, M.Acc & Fin, Ak (.....)

NIP. 19801127 200501 2003

FOTO

4 x 6

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

ABSTRAK

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO**

Adinda Intan DwitastanyP

Jurusan S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Otonomi daerah diharapkan mampu membawa perubahan pada kemampuan keuangan daerah yang harus mulai mandiri. Namun masih banyak daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada transfer pemerintah pusat. Pengelolaan sumber daya daerah yang baik dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah dapat digunakan empat analisis rasio keuangan daerah, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan,

Hasil penelitian di beberapa daerah menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun terdapat beberapa daerah yang memiliki ketergantungan yang rendah kepada pemerintah pusat.

Kata Kunci: Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE FINANCIAL CAPACITY OF THE DISTRICT BONDOWOSO

Adinda Intan D

*Bachelor degree in Accounting Department, Economic and Business Faculty of
Jember University*

Regional autonomy is expected to bring changes to the financial capacity of the region should begin to be independent. But there are still many areas that have a high dependence on central government transfers. Management of regional resources can to be one of the way to reduce dependence on central governmen.

To determine the financial capacity of a region can be used four regional financial ratio analysis, such as Financial Independence Ratio, Decentralizatio Fiscal Ratio, Routine Capability Index Ratio, and Growth Ratio.

Research in some areas showed a high level of dependency of local governments to the central government. But still there are some areas that have low dependence on the central government

Keywords: Financial, Regional Autonomy, Revenue and Expenditure (Budget).

RINGKASAN

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO; Adinda Intan D; 130810301133; 65 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Nataluddin, 2001). Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Menurut Abdul Halim (2008) bahwa kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dengan beberapa indikator antara lain, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, rasio desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah, rasio indeks kemampuan rutin menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya, rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode ke periode lainnya.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemampuan keuangan di daerah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.

PRAKATA

Bissmillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW.

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com.,Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Djoko Supadmoko, MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Aisa Tri Agustini, SE, MSc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nur Hisammudin, SE, M.SA, Ak, selaku dosen wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama studi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan POMA Ekonomi dan Perpustakaan Pusat.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, yang telah memberikan ijin penelitian skripsi kepada saya.
8. Ayahanda Alm Drs. Abdul Manan dan Ibunda Siti Sumartini tersayang, yang selama ini dengan sabar dan penuh kasih sayang telah membesarkan dan merawat saya hingga saya sampai saat ini. Dan juga dengan sabar memberi dukungan, doa, saran, dan kritikan kepada saya. Terima kasih yang tak terhingga untuk Papi dan Mami, sungguh karunia yang hebat menjadi putri sulung kalian.
9. Kakakku tersayang Adhistia Paramita, yang selama ini selalu mendukung saya sehingga saya lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Gilang Wahyu Apriliawan, yang selama ini selalu ada untuk saya saat senang ataupun susah, selalu membuan saya menjadi seseorang yang tabah, kuat, tegar dan sabar menjalani semua berkah dan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT.
11. Kakak Iparku Dwi Nur Fardianto, yang selama ini selalu memberikan nasehat dan semangat kepada saya.
12. Teman-teman akuntansi UNEJ 2013, selamat berjuang dan semoga sukses.
13. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Alhamdulillahirabbilalamin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 13 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Otonomi Daerah	9

2.1.1	Pengertian Otonomi Daerah	9
2.1.2	Daerah Otonom	10
2.1.3	Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah.....	10
2.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
2.2.1	Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD.....	13
2.3	Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	16
2.3.1	Kemampuan Keuangan Daerah	16
2.4	Kerangka Berfikir	24
2.5	Ulasan Penelitian Terdahulu	25
2.6	Perbedaan dan Persamaan antara Peneliti Terdahulu Dengan Peneliti Sekarang	28
BAB 3	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Rancangan Penelitian	30
3.2	Obyek Penelitian	30
3.3	Jenis dan Sumber Data	30
3.4	Definisi Operasional	30
3.4.1	Kemampuan Keuangan Daerah.....	30
3.5	Metode Analisis Data.....	33
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Kondisi Ekonomi Kabupaten Bondowoso	36
4.1.1	Potensi Unggulan Daerah	36
4.1.2	Pendapatan Regional Kabupaten Bondowoso.....	37
4.2	Analisis Data	37
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	40
2.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	42
3.	Rasio Indeks Kemampuan Rutin.....	44

4. Rasio Pertumbuhan.....	45
4.3 Pembahasan	48
4.3.1 Pembahasan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	51
4.3.2 Pembahasan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	53
4.3.3 Pembahasan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	55
4.3.4 Pembahasan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	56
BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan	61
5.3 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah	20
Tabel 2.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiiskal	21
Tabel 2.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin	22
Tabel 2.4 Ulasan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah	31
Tabel 3.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	32
Tabel 3.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin	33
Tabel 4.1 Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	38
Tabel 4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	40
Tabel 4.3 Kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	42
Tabel 4.4 Kontribusi PAD terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	44
Tabel 4.5 Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	46
Tabel 4.6 Sumber-sumber PAD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	24
Gambar 4.1 Realisasi APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015 (Dalam Juta Rupiah).....	38
Gambar 4.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	41
Gambar 4.3 Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015.....	43
Gambar 4.4 Tingkat Indeks Kemampuan Rutin Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015.....	45
Gambar 4.5 Tingkat Pertumbuhan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011-2015	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Peta Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso
- Lampiran B Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011
- Lampiran C Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012
- Lampiran D Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2013
- Lampiran E Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014
- Lampiran F Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan, menurut (Baswir:2007) mendefinisikan bahwa Akuntansi Pemerintahan (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Organisasi pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Bentuk-bentuk organisasi pemerintahan atau organisasi nirlaba yaitu, instansi pemerintahan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi keagamaan, yayasan bidang sosial, yayasan bidang keagamaan, dan yayasan bidang kemanusiaan. Organisasi pemerintahan harus mampu mengelola aktivitas operasionalnya dengan baik untuk mencapai target yang diinginkan. Organisasi pemerintahan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya membutuhkan jasa akuntan untuk memantau dan memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Menurut Abdul Halim (2012) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan”.

Menurut Indra Bastian (2010) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai:

“mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan dan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Hal ini terwujud dengan pengaturan, pemanfaatan sumber daya nasional, dan perimbangan keuangan daerah secara demokratis, pemerataan keadilan, peran serta dari masyarakat, memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Peranan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan menentukan berhasil atau tidaknya kemandirian dari suatu daerah yang selalu didambakan setiap daerah. Otonomi daerah diyakini sebagai jalan untuk menciptakan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2012), dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah *self supporting* di dalam bidang keuangan. Artinya, daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, sehingga tanggung jawab pemerintah daerah juga akan menjadi lebih kompleks. Pemberian kewenangan tersebut dapat menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian yang diharapkan. Beberapa aspek perlu dipersiapkan mulai dari SDM, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah untuk mensukseskan otonomi daerah. Aspek SDM merupakan dasar untuk mengetahui kompetensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individual, aspek keuangan merupakan dasar untuk mengetahui bagaimana suatu daerah dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri, aspek sarana dan prasarana merupakan dasar untuk mengetahui sejauh mana

suatu daerah mampu memenuhi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan kemampuan daerah merupakan dasar untuk mengetahui sedalam apakah suatu daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk membiayai daerahnya dengan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Kemandirian suatu daerah dilihat dari kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan pembangunan daerahnya sendiri tanpa campur tangan daerah lain.

Insukindro, dkk. (1994) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan semakin besarnya sumbangan PAD kepada APBD maka menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai kosekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 18 bahwa :

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan catatan informasi keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu daerah selama satu periode akuntansi yang berguna untuk menggambarkan kinerja organisasi tersebut. Laporan keuangan berguna untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu mengetahui ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai Kemajuan Keuangan

yang berkaitan dengan Otonomi Daerah beberapa kali dilakukan di beberapa daerah oleh peneliti yang berbeda. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy (2012), yaitu Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Pemerintah Kabupaten Bantul Universitas Negeri Yogyakarta (1). Rasio Kemandirian rata-ratanya sebesar 8.79% masih berada diantara 0%-25% yang berarti kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih sangat kurang, (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada pemerintahan Kabupaten Bantul masih dalam skala antara 0%-10% yaitu sebesar 8.07% yang berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam mendukung otonomi daerah khususnya dalam membiayai pembangunan daerah, (3). Rasio Indeks Kemampuan Rutin pada pemerintahan Kabupaten Bantul masih dalam skala interval antara 0%-20% yaitu sebesar 11.98%, dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam membiayai pengeluaran rutin, (4). Rasio Keserasian antara pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan yaitu sebesar 68.79% dan 31.21%, (5). Rasio Pertumbuhan Rata-rata secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yakni PAD sebesar 17.78%, TPD sebesar 15.02%, Belanja Rutin sebesar 14.65%, dan Belanja Pembangunan sebesar 38.93%, namun belum cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul karena rata-rata pertumbuhannya sangat sedikit. Dengan melihat hasil analisis kelima rasio tersebut, maka perkembangan kemampuan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih kurang.

Delisa Nisrina Hanifa (2016), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Surabaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2011-2015. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah pada Kota Surabaya dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian tersebut mengambil lokasi di Kota Surabaya. Untuk data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data keuangan APBD di

Kota Surabaya tahun anggaran 2011-2015, adapun teknik pengumpulan data adalah dokumentasi yang diperoleh dari arsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kota Surabaya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 62%-222% yang mana berada diatas 50 % yang berarti kemampuan pemerintah Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat sangat tinggi. Dalam rasio derajat desentralisasi fiskal berada pada kisaran 30%-55%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kota Surabaya sudah baik dalam melaksanakan otonominya. Untuk rasio indeks kemampuan rutin berada pada kisaran 34%-77%, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang baik untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada rasio keserasian pengeluaran belanjaoperasi berkisar antara 71%-86%, sedangkan belanja modal berkisar antara 14%-29%, ini berarti bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada belanja modal. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.

Statistiik Daerah Kabupaten Bondowoso (2015) Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Bondowoso berada di persimpangan jalur dari Besuki dan Situbondo menuju Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut dan terletak di wilayah tapal kuda, Jawa Timur. Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km². Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Ini yang menyebabkan Kabupaten Bondowoso sulit berkembang di bandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Perkembangan yang terhambat akan mempengaruhi potensi yang ada di

Kabupaten Bondowoso yang harusnya bisa menjadi sumber pendapatan bagi Kabupaten Bondowoso. Contohnya saja dari potensi wisata, jika diamati Bondowoso memiliki potensi wisata yang menjanjikan, namun karena perkembangan Bondowoso yang terhambat mengakibatkan wisata di Bondowoso tidak banyak diketahui oleh wilayah lain, sehingga wisata di Kabupaten Bondowoso juga terhambat perkembangannya yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso.

Potensi wisata merupakan salah satu potensi yang dapat menghasilkan PAD yang menjanjikan, disamping potensi tersebut, terdapat potensi lainnya yang dapat menghasilkan PAD bagi Kabupaten Bondowoso misalnya, di bidang pertanian, perdagangan dan lain-lain apabila dikelola secara maksimal. Jumlah PAD yang dimiliki Kabupaten Bondowoso tergolong kecil apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya, contohnya saja Kabupaten Jember. Pada tahun 2014 PAD Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 134.684.701.401,68 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 69,3%, pada tahun 2015 PAD sebesar Rp 158.974.210.144,00 dengan tingkat pertumbuhan 18%, sedangkan PAD Kabupaten Jember pada tahun 2014 sebesar Rp. 460.927.000.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 17,68%, pada tahun 2015 PAD sebesar Rp. 508.051.000.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,75%.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Bondowoso. Daerah Bondowoso dipilih untuk mengetahui kemampuan keuangan dari Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, karena jika dilihat dari faktanya pertumbuhan Kabupaten Bondowoso masih belum sepesat daerah-daerah sekitarnya, seperti Jember. Menurut Abdul Halim (2008) bahwa kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dengan beberapa indikator antara lain, rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, rasio desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk

menciptakan kemandirian daerah, rasio indeks kemampuan rutin menunjukkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan oemerintahannya, rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari suatu periode ke periode lainnya. Maka dari, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso, hal ini memunculkan permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti untuk dikaji lebih lanjut. Apakah faktor penghambat dari pertumbuhan di Kabupaten Bondowoso.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu tentang kinerja keuangan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat daerah kabupaten, permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso telah mampu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemampuan keuangan di daerah Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh beberapa pihak, antara lain:

a. Pemerintah

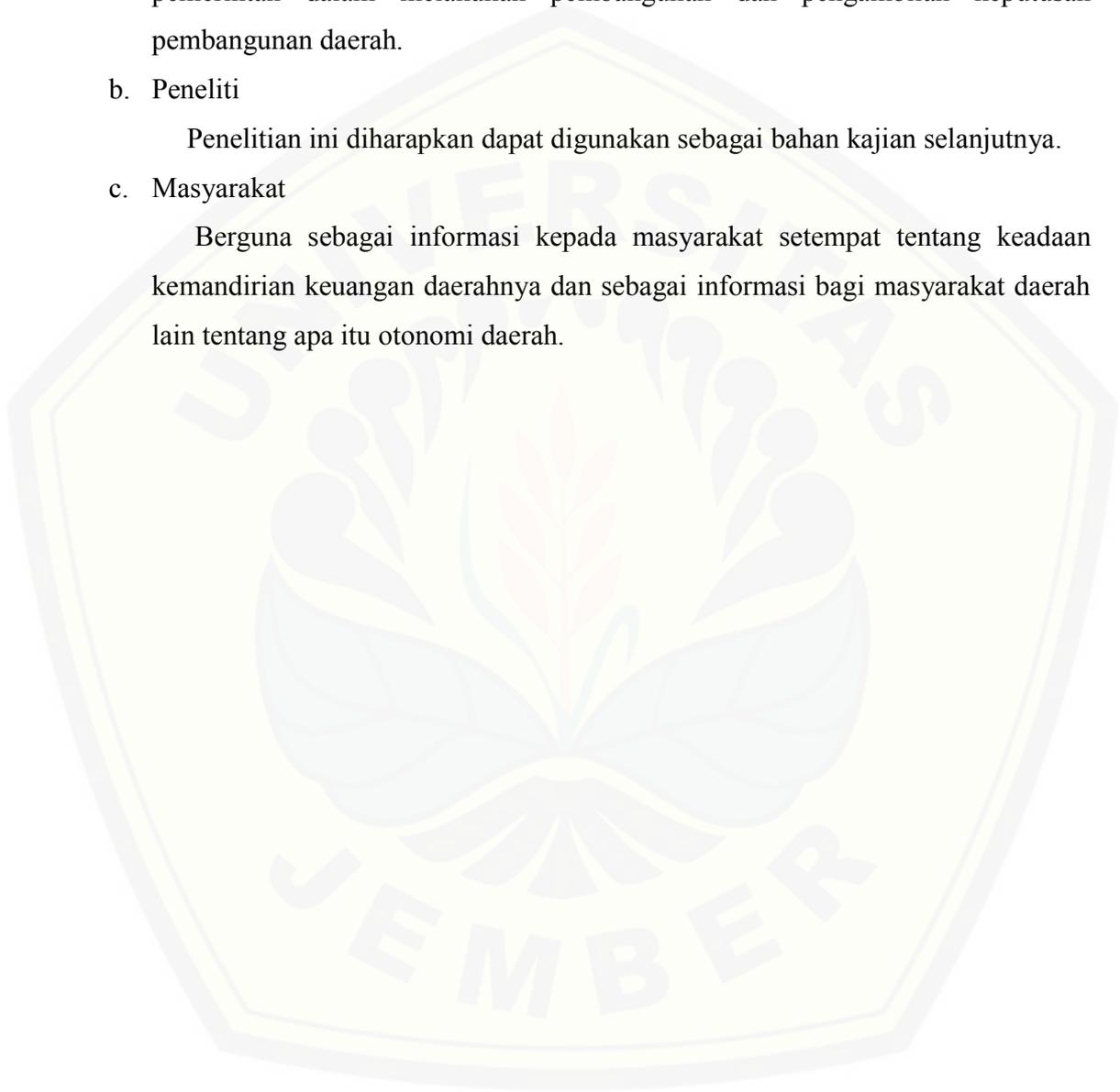
Berguna sebagai informasi yang digunakan sebagai bahan masukan untuk pemerintah dalam melakukan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian selanjutnya.

c. Masyarakat

Berguna sebagai informasi kepada masyarakat setempat tentang keadaan kemandirian keuangan daerahnya dan sebagai informasi bagi masyarakat daerah lain tentang apa itu otonomi daerah.



BAB 2. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut (Suparmoko:2002) mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya merupakan otonomi masyarakat setempat berguna untuk memecahkan masalah-masalah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat setempat demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Menurut (Piliang:2003) mendefinisikan pada tingkat yang terendah, otonomi berarti mengacu pada perwujudan *free will* yang melekat pada diri manusia sebagai salah satu anugerah yang paling berharga dari Tuhan. *Free will* inilah yang mendorong manusia untuk mengaktualisasikan diri dan menggali seluruh potensi terbaik dirinya secara maksimal. Berawal dari individu-individu yang otonom tersebut kemudian membentuk komunitas dan menjadi bangsa yang unggul.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 8, 9, dan 11 tentang pemerintah daerah ada 3 dasar sistem hubungan dengan pusat dan daerah, yaitu :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebbagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah provinsi”.

2.1.2 Daerah Otonom

Menurut UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi maysarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut (Mardiasmo:2002) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi otonomi yang terbatas
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan daerah kota tidak lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah
- f. Pelaksanaan otonomin daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas penyelenggaraan otonomi daerah
- g. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut (Hariadi:2010), APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung. APBD juga merupakan ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung. Baik APBN dan APBD merupakan inti keuangan (akuntansi) pemerintahan, terutama dalam era prareformasi keuangan negara/daerah karena

selama era tersebut anggaran merupakan satu-satunya informasi keuangan yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam pengelolaan pemerintahan sangat penting, terlebih pada era reformasi keuangan negara/daerah.

Menurut (Hariadi:2010), APBN dan APBD merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara/daerah. Anggaran dalam inti luas meliputi suatu daur/siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Anggaran negara/daerah memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara/daerah selama periode tertentu,
2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena persetujuan DPR/DPRD harus didapatkan terlebih dahulu sebelum anggaran dijalankan,
3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya karena anggaran pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPR/DPRD.

Menurut (Hariadi:2010), APBN/APBD memiliki beberapa unsur berikut:

1. Rencana kegiatan beserta urutannya secara terperinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut,
3. Adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan,
4. Jenis kegiatan yang dituangkan dalam bentuk angka,
5. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

Menurut (Hariadi:2010), Istilah, prosedur, formulir-formulir yang digunakan dalam menatausahakan APBN/APBD terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam bidang keuangan negara/daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003, fungsi APBD dirumuskan sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, yaitu bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang bersangkutan,
2. Fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan,
3. Fungsi pengawasan, yaitu sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan,
4. Fungsi alokasi, yaitu bahwa APBD harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian,
5. Fungsi distribusi, yaitu bahwa kebijakan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan,
6. Fungsi stabilitas, yaitu alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

2.2.1 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Menurut (Hariadi:2010), dalam menyusun APBD harus diperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

1. **Partisipasi masyarakat**, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD
2. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan

3. **Disiplin anggaran**, adalah (a) pendapat yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur yang secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (b) pengangggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit anggarannya dalam APBD atau perubahan APBD; (c) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah
4. **Keadilan anggaran**, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi
5. **Efisiensi dan efektivitas anggaran**, dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Karena itu, untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas anggaran, hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam perancangan anggaran: (a) penetapan tujuan dan sasaran, hasil, serta manfaat dan indikator kinerja yang ingin dicapai secara jelas, (b) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang maksimal
6. **Taat asas**, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga haknya dengan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut (Hariadi:2010), kebijakan penyusunan anggaran didasarkan pada struktur dari APBD yang terdiri atas:

1. Pendapatan daerah, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - a. PAD mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - b. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah mencakup, Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonomi Khusus.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah setempat.

Belanja Daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja langsung dapat diukur dengan hasil suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut terdiri dari belanja pegawai untuk membayar honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa, dan belanja modal

b. Belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan, seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah digunakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.3 Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut UU No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian di atas dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah (Mamesah:1995).

2.3.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Nataluddin, 2001). Salah satu faktor

penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini (Kaho:2001) menegaskan

“Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Sementara itu untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber yang cukup pula. Menurut (Kaho:2007), ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh daerah untuk memperoleh keuangannya, antara lain:

- a. Daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah di restui oleh pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, perbankan, atau melalui pemerintah pusat;
- c. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keuangan daerah menurut Kepmendagri No. 13 Tahun 2006 adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah”. Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta

pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Abdul Halim, 2007).

Struktur keuangan daerah kabupaten dan kota terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut mengindikasikan bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Analisis kemampuan keuangan daerah dapat diteliti dari beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut harus disesuaikan dengan data APBD. Analisis kemampuan keuangan daerah dapat diketahui dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kemandirian Keuangan Daerah

Pengertian kemandirian keuangan daerah menurut Abdul Halim (2008), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Abdul Halim (2008)

menyatakan bahwa, kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Harsey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Situational Approach” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin:2001)

- a. Pola Hubungan Instrukturif, peranan pemerintahan pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintahan daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah

Bertolak dari teori tersebut, karena perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia menyebabkan perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Pola Hubungan	Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan
Instruktif	0%-25%	rendah sekali
Konsultatif	25%-50%	Rendah
Partisipatif	50%-75%	Sedang
Delegatif	75%-100%	Tinggi

Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Sumber : Abdul Halim (2008)

b. Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan termasuk di dalamnya desentralisasi fiskal mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi. Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Bappenas:2003).

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah. (Sidik:2002) menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat mengingat ketergantungan semacam akan mengurangi kreatifitas daerah untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan daerah yang lebih efisien.

Menurut (Muluk:2005), desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, dan kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiyai pengeluaran tersebut.

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna

membayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah

Menurut Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam tabel adalah sebagai berikut (Anita W, 2001:22):

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	sangat baik

Tabel 2.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi

Sumber : Anita Wulandari (2001)

c. Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya (Abdul Halim, 2007).

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya (Munir dkk). Indeks Kemampuan Rutin yaitu : Proposal antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat (kuncoro, 1997). Sedangkan dalam menilai Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan menggunakan skala menurut Tumilar (1997 : 15) sebagaimana yang terlihat dalam tabel sebagai berikut (Anita W, 2001 :22).

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00	Sangat kurang
20,01-40,00	Kurang
40,01-60,00	Cukup
60,01-80,00	Baik
80,00-100	Sangat baik

Tabel 2.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

Sumber : Anita Wulandari (2001)

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya UU tentang Otonomi Daerah, membawa kosekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin:2001) :

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah, dan
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001) :

- a) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya
- b) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Hasil Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah dserah menjadi leboh lebih besar.

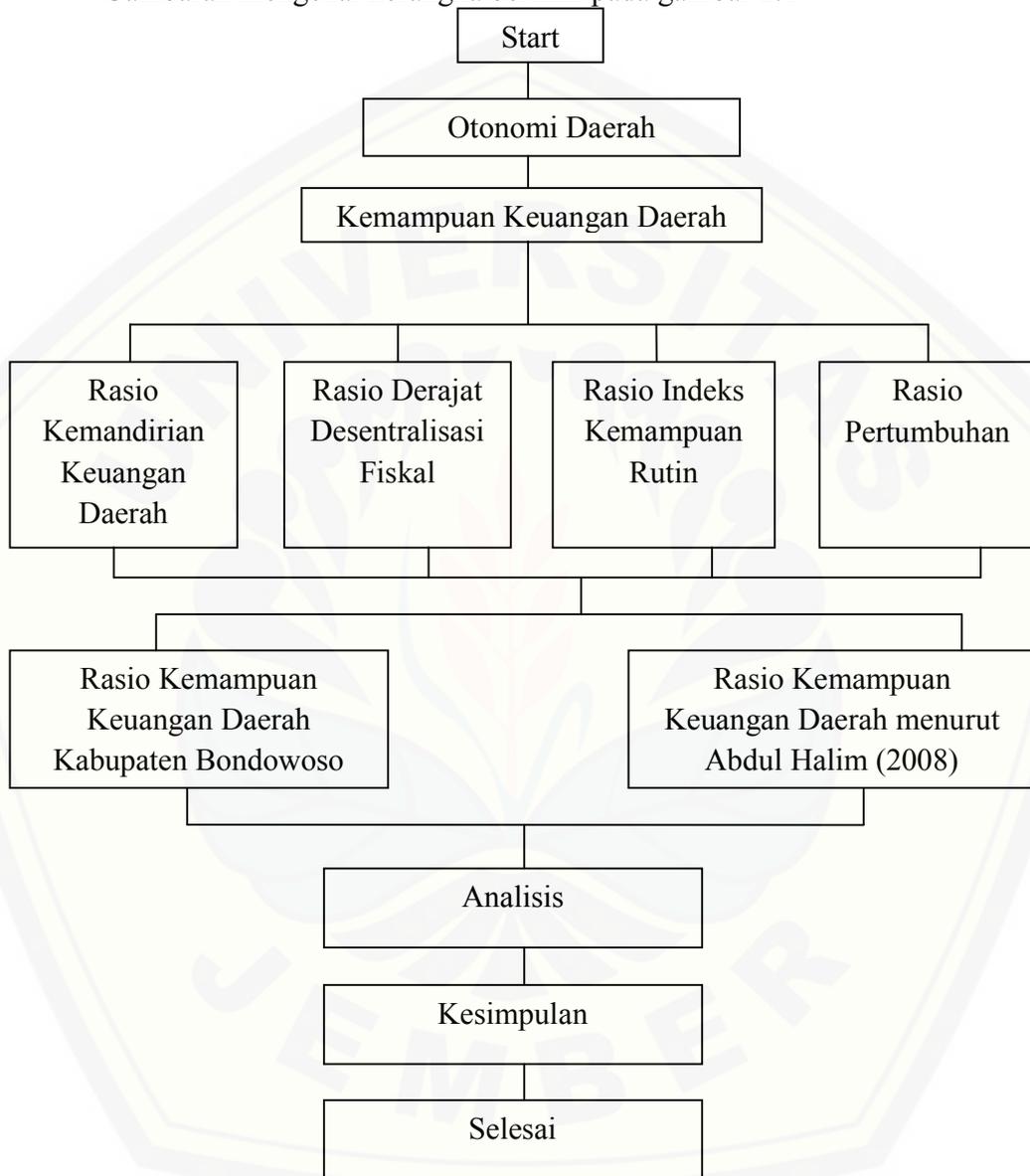
d. Rasio Pertumbuhan

Menurut Abdul Halim (2008), rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan dana yang harus dihimpun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah sendiri (Hirawan, 1990). Semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhan adalah positif, artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambaran mengenai kerangka berfikir pada gambar 2.1



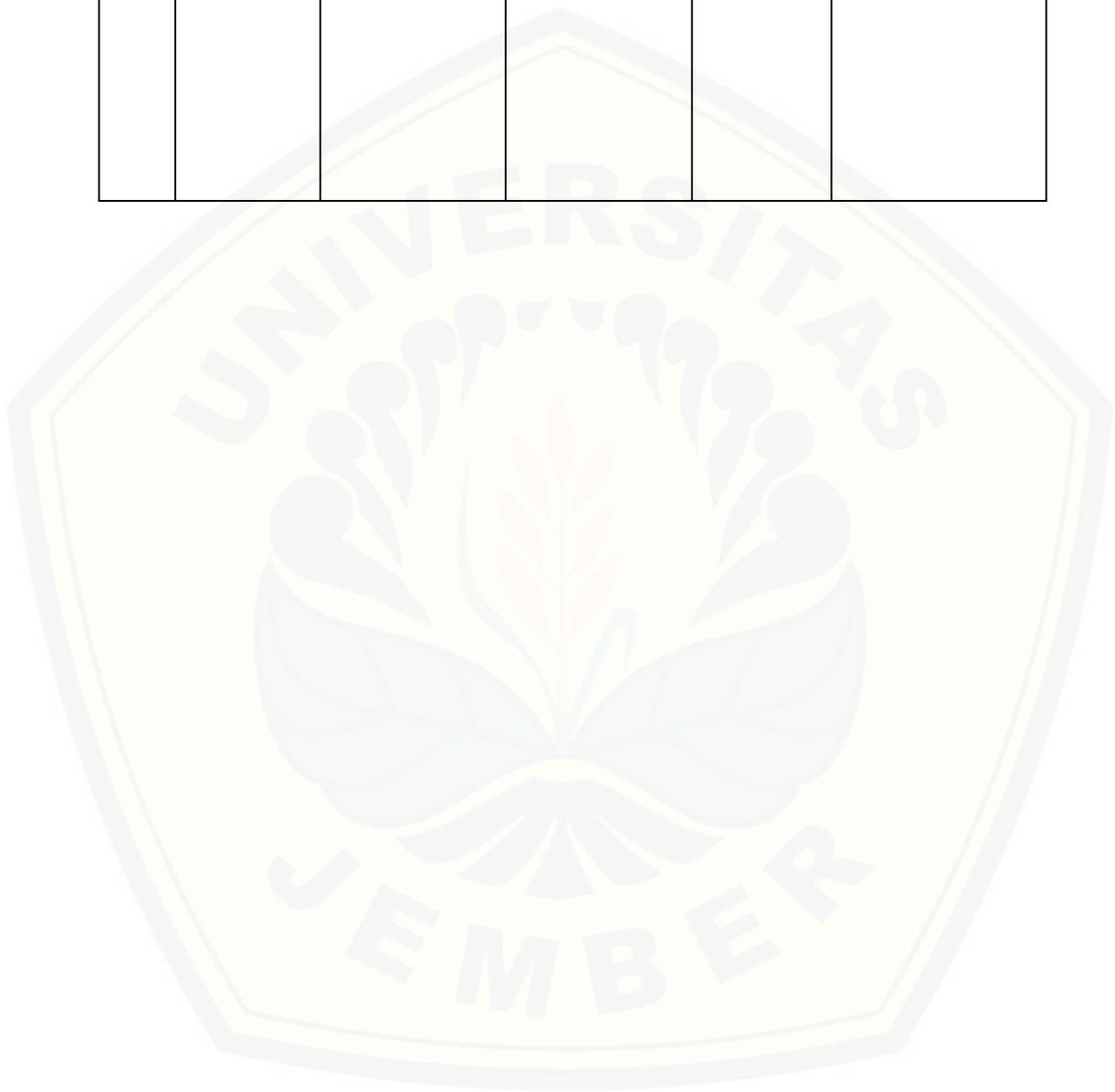
Berikut ini tabel yang berisi ringkasan dari beberapa ulasan penelitian terdahulu mengenai keuangan daerah dalam Otonomi Daerah.

Tabel 2.4 Ulasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Obyek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hanifa (2016)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kota Surabaya Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	Menganalisis kemampuan keuangan daerah pada Kota Surabaya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah	Kota Surabaya	Hasilnya menunjukkan bahwa PAD memiliki kemampuan yang baik untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dengan rasio pertumbuhan yang terus meningkat di setiap tahunnya disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah.
2	Shiddqy (2012)	Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bsntul	Menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah	Kabupaten Bsntul	Hasilnya menunjukkan bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

3	Sakti (2007)	Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dan Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo	Menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dan mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah	Kabupaten Sukoharjo	Adanya ketergantungan yang lebih tinggi pada pemerintah pusat, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
4	Landiyanto (2005)	Analisis Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah di Kota Surabaya	Meneliti kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di Era otonomi Daerah	Kota Surabaya	Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah
5	Wulandari (2001)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi	Meneliti kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Jambi	Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, terdapat kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah
6	Widodo (2001)	Analisis Rasio Keuangan APBD di Kabupaten Boyolali	Menganalisis rasio keuangan APBD	Kabupaten Boyolali	Rendahnya pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebtuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pemabngunan

					dan masyarakat yang cenderung menurun.
--	--	--	--	--	--



2.5 Perbedaan dan Persamaan antara Peneliti Terdahulu dengan Peneliti Sekarang

Dalam penelitian ini antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini pasti memiliki perbedaan dan persamaan. Berikut perbedaan dan persamaan antara peneliti-peneliti terdahulu dan peneliti saat ini :

1. Hanifa (2016) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
 - a. Perbedaan
 1. Penelitian oleh Hanifa dilakukan di Kota Surabaya
 2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasia, dan Rasio Keserasian.
 - b. Persamaan
 1. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 2011-2015
2. Shiddqy (2012) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
 - a. Perbedaan
 1. Penelitian oleh Shiddqy dilakukan di Kabupaten Bantul
 2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasia, dan Rasio Keserasian.
 3. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 2007-2011.
3. Sakti (2007) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
 - a. Perbedaan
 1. Penelitian oleh Sakti dilakukan di Kabupaten Sukoharjo
 2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasia, dan Rasio Keserasian.
 3. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 2002-2006.

4. Landiyanto (2005) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
 - a. Perbedaan
 1. Penelitian oleh Landiyanto dilakukan di Kota Surabaya
 2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, dan Rasio Keserasian.
 3. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 1999-2000.
5. Wulandari (2001) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
 - a. Perbedaan
 1. Penelitian oleh Wulandari dilakukan di Kota Jambi
 2. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 1996-2000
 - b. Persamaan
 1. Penelitian yang dilakukan menggunakan empat rasio, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Keserasian.
6. Widodo (2001) dengan Adinda Intan Dwitastany (2016)
 - a. Perbedaan
 1. Penelitian oleh Widodo dilakukan di Kabupaten Boyolali
 2. Penelitian yang dilakukan menggunakan lima rasio, yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian, dan Rasio Keserasian
 3. Data penelitian menggunakan APBD Tahun Anggaran 1999-2000.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan menggambarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso. Penelitian merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan data sekunder kuantitatif. Data sekunder yang digunakan merupakan laporan keuangan yang diublikasikan.

3.2 Obyek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bondowoso karena APBD yang dianggap rendah jika dibandingkan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso, sehingga peneliti mempunyai rasa ingin tahu mengenai tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso apa telah mampu mendukung pelaksanaan urusan pemerintahannya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekundernya umumnya adalah bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data Sekunder ini berupa ringkasan laporan keuangan (APBD) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015, yang diperoleh dari instansi terkait yang ada di Kabupaten Bondowoso.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Nataluddin, 2001). Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan

keuangan daerah dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Indikator untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah:

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahmudi, 2007). Abdul Halim (2008) menyatakan bahwa, kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}} \times 100\%$$

Pola Hubungan	Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan
Instruktif	0%-25%	rendah sekali
Konsultatif	25%-50%	Rendah
Partisipatif	50%-75%	Sedang
Delegatif	75%-100%	Tinggi

Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Sumber : Abdul Halim (2008)

b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah

dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal menurut Abdul Halim (2008) diukur sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
<50,00	sangat baik

Tabel 3.2 Skala Interval Derajat Desentralisasi

Sumber : Abdul Halim (2008)

c) Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya (Abdul Halim, 2008).

$$\text{Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-20,00	Sangat kurang
20,01-40,00	Kurang
40,01-60,00	Cukup
60,01-80,00	Baik
80,00-100	Sangat baik

Tabel 3.3 Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

d) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan (Abdul Halim, 2008).

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

3.4 Metode Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan beberapa tahapan analisis yang berturut-turut sebagai berikut:

- a. Pengambilan data keuangan daerah yang berasal dari APBD tahun 2011-2015
- b. Data yang telah dikumpulkan untuk keperluan laporan dan atau analisis selanjutnya, perlu diatur, disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Untuk menggambarkan keadaan yang *serba terus* atau berkesinambungan, maka dibuat diagram garis.

- c. Data yang berasal keuangan dari APBD Kabupaten Bondowoso kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}} \times 100\%$$

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

r : Rasio Perumbuhan

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan dapat dirumuskan :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data APBD (TPD, PAD, Belanja Rutin, Belanja Pembangunan)
yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 : Data APBD (TPD, PAD, Belanja Rutin, Belanja Pembangunan)
yang dihitung pada tahun ke-0

r : Rasio Pertumbuhan

- d. Memberikan rekomendasi dan kesimpulan berdasarkan analisis data

BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Setelah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso masih sangat rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, hal ini terbukti dengan perhitungan rasio-rasio yang hasilnya berada pada skala interval sangat rendah, yang artinya peranan Pendapatan Pihak Ekstern lebih dominan dibandingkan dengan PAD Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaan otonomi daerah suatu daerah harus mampu menggali potensi dan sumber keuangan di daerahnya serta mengelola dan menggunakannya dengan baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya. Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah sebesar 8,25 masih berada diantara 0%-25% tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri dari tahun ke tahun (2011-2015) terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso pada sumber pendapatan lain dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara milik pemerintah pusat.
2. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun (2011-2015), menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso tingkat

rasionya rata-rata hanya sebesar 7,6% yang masih berada di skala interval antara 0,00-10,00% yang artinya pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso belum mampu membiayai pembangunannya sendiri walaupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso meningkat dari tahun ke tahun (2011-20015).

3. Berdasarkan Rasio Indeks Kemampuan Rutin, tingkat rata-rata Rasio Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015 hanya sebesar 7,7% ini artinya Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten Bondowoso sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00%. Hal ini berarti Pendapatan Asli Keuangan (PAD) Kabupaten Bondowoso memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya.
4. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan baik pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan pendapatan lain dari pihak ekstern, dan pertumbuhan belanja rutin menunjukkan keadaan yang relative berubah-ubah selama lima tahun ini (2011-2015), walaupun kadang mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu tetapi apabila diakumulasikan secara keseluruhan mengalami peningkatan.
5. Berdasarkan empat analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan realisasi APBD Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2011-2015, menyimpulkan bahwa keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso masih dikategorikan belum bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Kabupaten Bondowoso, karena Belanja Daerah lebih tinggi daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2015, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

6. PAD Kabupaten Bondowoso pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan PAD terjadi karena adanya peningkatan dari komponen-komponen PAD yaitu peningkatan dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Peningkatan yang terjadi merupakan cerminan adanya usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso.

5.2 Keterbatasan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data serta kesimpulan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso
2. Kurangnya perhatian terhadap sektor unggulan yang ada di Kabupaten Bondowoso
3. Kurangnya perhatian kepada keanekaragaman daerah Kabupaten Bondowoso
4. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menyukkseskan otonomi daerah
5. Peneliti hanya menggunakan empat model analisis rasio keuangan, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan rasio-rasio lainnya.
6. Penelitian ini hanya meneliti satu daerah saja, sehingga tidak ada faktor sebagai pembanding dari hasil analisis data.
7. Peneliti hanya menggunakan APBD pada tahun 2011-2015

5.3 Saran

Bedasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang perkembangan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang dimiliki pemerintah pusat yang memiliki potensial yang baik untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso perlu meningkatkan nilai tambah sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso khususnya sektor pertanian dan pariwisata, sehingga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu memperhatikan susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pada pemerintah daerah. Kesempatan yang besar perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik yang membangun atas kebijakan yang diambil pemerintah. Karena pada dasarnya otonomi daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan otonomi daerah.
5. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan rasio-raiso lainnya untuk mendukung hasil analisis dari penelitian kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
6. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan dua daerah maupun lebih untuk dianalisis sehingga peneliti selanjutnya memiliki perbandingan hasil.
7. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan tahun penelitian agar data yang disajikan dapat lebih luas.

Lampiran A Peta Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

A



Lampiran B Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2011

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)		
		3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	60.582.172.950,00	66.816.392.275,09	110,29
1.1.1	Pajak Daerah	6.463.067.000,00	9.092.480.799,00	140,68
1.1.2	Retribusi Daerah	43.859.512.500,00	15.553.447.295,00	35,46
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.564.588.000,00	4.564.588.193,73	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.695.005.450,00	37.605.875.987,36	660,33
1.2	Dana Perimbangan	650.347.255.937,00	660.619.810.828,00	101,58
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.482.413.973,00	53.765.668.828,00	123,65
1.2.2	Dana Alokasi Umum	539.918.142.000,00	539.918.142.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.946.700.000,00	66.936.000.000,00	99,98
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	234.653.775.400,00	239.519.837.841,00	102,07
1.3.1	Hibah	1.657.500.000,00	1.339.994.500,00	80,84
1.3.3	Lainnya	28.271.833.600,00	33.447.401.541,00	118,31
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	138.062.389.800,00	138.062.389.800,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	51.396.655.000,00	51.404.655.000,00	100,02
1.3.6	Dana Penguatan dan Percepatan	15.265.397.000,00	15.265.397.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	945.583.204.323,00	966.956.040.944,04	102,26
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	634.173.929.364,08	618.371.248.673,15	97,51
2.1.1	Belanja Pegawai	550.590.926.915,00	537.216.728.249,00	97,57
2.1.2	Belanja Bunga	163.515.000,00	38.883.355,15	23,78
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	16.629.103.000,00	18.339.487.000,00	98,45
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.625.928.800,00	11.288.154.200,00	97,09
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	51.122.203.200,00	50.683.995.869,00	99,14
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.042.252.749,08	804.000.000,00	39,37

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI (Rp)		%
		2	3	4	5	
1						
2.2	Belanja Langsung		401.637.098.110,00	332.586.908.772,34		82,81
2.2.1	Belanja Pegawai		27.190.120.633	23.226.913.537,00		85,42
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		146.377.295.183,00	139.481.715.418,34		94,00
2.2.3	Belanja Modal		226.069.782.273,83	169.878.279.817,00		75,14
	Jumlah Belanja		1.035.811.127.474,08	950.958.154.445,49		91,81
	Surplus (defisit)		-90.227.923.151,08	15.997.883.498,60		-17,73
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		94.895.449.951,08	94.895.449.951,08		100,00
3.1.1	(SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		0	0		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0		
3.1.4	Penanaman Pinjaman Daerah		0	0		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman		1.099.700.000,00	291.389.996,60		26,50
3.1.6	Penanaman Pinjaman Daerah		0	0		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		95.995.149.951,08	95.186.839.945,68		99,16
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		267.226.800,00	267.226.800,00		100,00
3.2.4	Pembelian Pinjaman Daerah		0	0		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		5.767.226.800,00	5.767.226.800,00		100,00
	Pembiayaan Neto		90.227.923.151,08	89.419.613.147,68		99,10
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		0	105.417.496.646,28		

Lampiran C Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR : 19
TANGGAL : 5 JULI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	6 (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.073.390.149.430,73	1.073.390.149.430,73	26.215.102.430,73	102,50	114,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.082.147.300,00	77.846.177.656,73	9.764.030.356,73	138,41	101,22
Hati/Padat Daerah	7.781.988.000,00	10.079.054.105,00	2.297.066.105,00	130,00	101,22
Hati/Padat Provinsi	19.689.189.000,00	19.908.881.115,00	219.692.115,00	101,00	101,00
Hati/Padat Kabupaten	4.962.292.150,00	4.962.292.150,00	37,80	100,00	110,60
Layanan Pemukiman Asli Daerah Yang Sph	36.158.696.100,00	42.895.439.947,93	6.737.253.757,93	116,00	102,08
DAFTAR PERIMBANGAN	780.378.962.100,00	796.616.595.915,00	16.237.633.815,00	102,08	133,76
Dana Bagi Hasil Pajak/Rogji Hasil Bulanan Pajak	48.103.970.100,00	64.341.603.915,00	16.237.633.815,00	133,76	100,00
Dana Alokasi Umum	666.857.212.000,00	666.857.212.000,00	0,00	100,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	65.417.780.000,00	65.417.780.000,00	0,00	100,00	100,11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.713.937.600,00	198.927.375.639,00	213.638.259,00	100,11	2,61
Pendapatan Hibah	3.563.807.150,00	94.352.100,00	(3.469.455.050,00)	2,61	109,08
Dana Bagi Hasil Pajak dan Royalti dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.273.094.450,00	33.020.730.951,00	2.747.135.501,00	109,08	100,00
Dana Penyesuaian dan Ciptakan Khusus	104.556.096.000,00	104.556.096.000,00	0,00	100,00	99,51
Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	60.321.030.000,00	60.302.760.000,00	(18.270.000,00)	99,51	0,04
Dana Perimbangan dan Percepatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	0,00	951.598.000,00	951.598.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Retribusi dan Privatisasi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.829.808,00	1.829.808,00	0,00	95,6
BELANJA DAERAH	1.122.663.670.146,28	1.074.126.371.921,77	(48.537.298.224,51)	95,6	97,9
BELANJA TIDAK LANGSUNG	690.352.064.505,46	679.563.349.093,62	(14.388.714.811,84)	97,9	96,1
Belanja Pegawai	613.659.691.014,46	603.079.750.478,00	(11.579.940.536,46)	96,1	95,5
Belanja Bangunan	7.768.135,00	7.768.134,62	(0,38)	100,00	98,1
Belanja Subsidi	600.000.000,00	573.260.000,00	(26.740.000,00)	95,5	100,00
Belanja Hibah	18.123.999.000,00	17.772.062.133,00	(351.936.867,00)	98,1	100,00
Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00	99,1
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	53.657.637.440,00	53.305.451.848,00	(352.185.592,00)	99,1	

Halaman

Lampiran D Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2013

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 19
TANGGAL : 5 JULI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / BERKURANG		
	3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)		
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.047.175.947,00,00	1.073.390.149.430,73	26.215.102.430,73	114,34		
Hack Pajak Daerah	68.082.147.300,00	77.846.177.656,73	9.764.030.356,73	138,41		
Hack Pajak Daerah	7.281.880.000,00	10.079.054.105,00	2.797.174.105,00	101,22		
Hack Pajak Daerah	19.659.180.000,00	15.908.881.115,00	(3.750.218.885,00)	100,00		
Hack Pajak Daerah	4.927.294.150,00	4.962.292.187,80	37,80	118,60		
Lain-lain Pendapatan asli Daerah Yang Sdk	36.158.696.150,00	42.895.839.947,93	6.727.253.797,93	102,08		
DAHA PERTAMBANGAN	780.378.862,100,00	796.616.595.915,00	16.237.733.815,00	133,76		
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.103.870.100,00	64.341.601.915,00	16.237.733.815,00	100,00		
Dana Alokasi Umum	666.857.212.000,00	65.417.709.000,00	(601.440.503,00)	100,00		
Dana Alokasi Khusus	65.417.709.000,00	65.417.709.000,00	0,00	100,11		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.713.931.600,00	198.927.375.859,00	213.438.259,00	2,62		
Perizinan Hibah	3.563.807.150,00	94.352.100,00	(3.469.455.050,00)	109,68		
Dana Bagi Hasil Pajak dan Stovind dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.273.004.450,00	33.020.739.951,00	2.747.735.501,00	100,00		
Dana Perizinan dan Criblioni Khusus	104.556.096.000,00	104.556.096.000,00	0,00	99,52		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	60.321.030.000,00	60.302.760.000,00	(18.270.000,00)	0,00		
Dana Perizinan dan Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP202)	0,00	951.598.000,00	951.598.000,00	0,00		
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.829.808,00	1.829.808,00	0,00		
BELANJA DAERAH	1.122.663.670.246,28	1.074.126.371.921,77	(48.537.298.324,51)	95,6		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	690.352.064.505,46	675.923.349.093,52	(14.388.714.811,84)	97,9		
Bantuan Pegawai	613.659.691.014,46	603.079.750.478,00	(10.579.940.536,46)	100,0		
Bantuan Pegawai	7.768.134,00	7.768.134,00	0,00	95,5		
Bantuan Pegawai	600.000.000,00	573.260.000,00	(26.740.000,00)	98,0		
Bantuan Pegawai	18.123.999.000,00	17.772.062.133,00	(351.936.867,00)	100,0		
Bantuan Pegawai	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	99,1		
Bantuan Pegawai	53.657.637.440,00	53.305.451.848,00	(352.185.592,00)			

Hibman

Lampiran E Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014

PERHATIAN KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran I Peraturan Bupati
Nomor : 37 Tahun 2015
Tanggal : 29 Juli 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.496.714.343,00	1.534.483.251,06	37.768.906.748,68	102,52
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.594.215.457,00	134.684.701.403,68	7.180.485.934,68	105,63
1.1	Hasil Pajak Daerah	16.897.700.000,00	21.279.083.953,00	4.381.383.953,00	125,93
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.788.988.200,00	12.644.633.114,00	(5.144.355.086,00)	71,08
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.541.492.767,00	3.591.490.727,77	49.997,77	100,00
1.1.3	Hasil Penghasilan Kaya Raya Daerah yang Dipotong	89.276.035.500,00	97.218.891.565,91	7.942.855.065,91	108,90
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	960.896.282.110,00	979.336.597.137,00	18.440.314.927,00	101,92
1.2	DANA PERCIBANGKAN	48.349.512.228,00	66.690.180.156,00	18.340.667.927,00	138,22
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	821.583.705.981,00	821.583.705.981,00	0,00	100,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	91.063.070.000,00	91.063.070.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	408.313.646.636,00	400.461.632.523,00	(7.852.014.113,00)	98,08
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.306.345.000,00	1.052.928.286,00	(253.416.714,00)	78,46
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.404.236.636,00	70.094.953.637,00	11.690.717.001,00	120,02
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	188.430.411.000,00	188.430.411.000,00	0,00	100,00
1.3.4	Dana Penyelesaian dan Operasi Riset	160.127.777.000,00	160.127.777.000,00	0,00	99,99
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	743.863.000,00	743.863.000,00	0,00
1.3.7	Dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi	0,00	4.675.600,00	4.675.600,00	0,00
1.3.8	Dana Bagi Hasil Retribusi dan Provdi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	1.591.840.027.761,18	1.471.041.168.997,53	(120.735.848.763,65)	92,42
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	875.308.828.004,25	853.125.691.307,00	(22.183.136.697,25)	95,18
2.1	Belanja Pegawai	759.079.990.040,00	721.820.059.507,00	(37.259.930.533,00)	95,10
2.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	26.688.240.750,00	26.309.230.750,00	(379.009,00)	98,98
2.1.4	Belanja Hibah	7.330.000.000,00	4.595.857.462,00	(2.734.142.538,00)	62,70
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	80.059.885.900,00	79.346.311.588,00	(713.574.312,00)	99,10
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2.208.471.314,65	984.120.000,00	(1.216.301.314,65)	44,73
2.1.8	Belanja Tidak Terbagi	0,00	0,00	0,00	0,00

Halaman 1

LAMPIRAN I PERUBAHAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

1	2	3		4		5		6
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
		(156.100.894.512,33)	24.179.587.577,33			180.280.482.089,66	(15,49)	
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	159.600.894.512,33	159.639.203.012,33	38.308.500,00	100,02			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya	159.600.894.512,33	159.600.894.512,33	0,00	100,00			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	38.308.500,00	38.308.500,00	0,00			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	100,00			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	100,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	156.100.894.512,33	156.139.203.012,33	38.308.500,00	100,02			
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN	0,00	180.318.790.589,66	180.318.790.589,66	0,00			

BUPATI BONDOWOSO
ttd
AMIN SAID HUSNI

Halaman 2

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH - KINERJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018

